

BAB IV

REKONSTRUKSI STRUKTUR SOSIAL NOVEL SENJA DI JAKARTA

4.1 Pengantar

Setelah diuraikan unsur-unsur yang membentuk struktur novel *SdJ*, tercerminlah pandangan dunia pengarang setelah dikonkretkan terlebih dahulu. Di dalam fakta cerita, tampak ide-ide pengarang banyak bercampur antara struktur cerita dalam novel *SdJ* dengan struktur masyarakat yang melatarbelakanginya. Sehingga dalam proses pemahamannya perlu dihubungkan dengan pandangan dunia pengarang.

Pandangan dunia pengarang menentukan struktur karya sastra (novel). Oleh karena itu Goldmann (melalui Damono, 1978: 48) menyatakan bahwa karya sastra yang sah adalah karya sastra yang memiliki kepaduan internal yang menyebabkan mampu mengekspresikan kondisi manusia yang universal dan mendasar.

Sifat fiksionalitas yang tercermin dalam novel *SdJ* tidak menutup kemungkinan bagi penelitian proses logika

sejarah untuk memberi makna kehidupan pada novel itu. Peristiwa-peristiwa di dalam novel itu merupakan gambaran kehidupan tokoh-tokoh yang mengandung nilai-nilai sosial tertentu. Untuk itulah analisis aspek sosio-historis (genetik) pada novel *SdJ* dapat dilakukan dengan merekonstruksi struktur sosial yang terbayang di dalamnya. Melalui analisis latar sosial pada novel *SdJ*, dapat diketahui bagaimana struktur sosialnya. Dalam novel tersebut setiap peristiwa dan perilaku tokoh dapat dianggap sebagai fakta sosial yang dicerminkan novel ini.

Agar dapat memahami fakta sosial yang dicerminkan dalam novel *SdJ* ini, perlu dilakukan rekonstruksi aspek sosial yang disampaikan pengarang melalui teks novelnya.

Dalam hal ini yang dianggap paling memadai dilakukan adalah dengan menghubungkan fakta sosial novel *SdJ* dengan fakta sosial yang menyebabkan novel ini diciptakan. Rekonstruksi struktur sosial melalui teks, juga merupakan rekonstruksi mengenai peralatan konseptual yang merupakan dugaan sementara mengenai maksud pengarangnya. Artinya, sesudah munculnya dugaan sementara rekonstruksi tersebut (Atmaja, 1987: 33).

Atas dasar hal tersebut, analisis struktur sosial yang melatarbelakangi novel *SdJ* dilakukan setelah analisis struktur intrinsik. Selanjutnya akan diuraikan kelompok sosial dan pandangan dunia pengarang yang

melatarbelakangi novel tersebut dan berlanjut pada uraian tentang kondisi yang terbayang di dalamnya.

4.1.1 Kelompok Sosial Pengarang

Dalam usaha memahami karya sastra khususnya novel, tidak dapat dipisahkan dari kelompok sosial, yang di dalamnya pengarang menjadi salah satu anggotanya. Hal itu disebabkan karena setiap kelompok sosial dan masyarakat tertentu mempunyai pandangan dunianya sendiri. Misalnya, kelompok priyayi yang jelas berbeda dengan kelompok *wong cilik* dalam masyarakat Jawa. Dengan demikian pembicaraan mengenai kelompok sosial pengarang dan pandangan dunianya perlu dibicarakan. Dengan pandangan dunia itulah kelompok sosial pengarang merespon dunia dan mungkin akan mengadakan transendensi untuk membentuk suatu koherensi pandangan dunia yang baru apabila yang lama sudah dirasakan tidak cocok lagi.

Untuk mengetahui kelompok sosial Mochtar Lubis diperlukan penjelasan tentang kondisi sosial yang melatarbelakangi kelahiran novel *SdJ*. Kondisi sosial yang terdapat pada novel tersebut akan dihubungkan dengan fakta sosial yang terdapat di luar karya sastra.

Sebagai struktur sosial, kenyataan yang ditemui dalam rekonstruksi ini lebih bersifat abstrak. Hal ini disebabkan perhatian kelompok bukan pada individu atau tindakan antar individu, melainkan pola-pola tindakan dan jaringan-jaringan interaksi yang disempurnakan dari

pengamatan terhadap keteraturan dan keseragaman yang terdapat dalam ruang dan waktu (Paul Johnson, 1986: 61). Dengan demikian kelompok sosial tentunya bersifat impersonal dan objektif. Individu-individu yang terakup di dalamnya memiliki tanggapan-tanggapan yang berbeda terhadap situasi sosial budaya tertentu, sesuai dengan pandangan dan interpretasi masing-masing. Hal ini yang kadang-kadang mengakibatkan timbulnya perbedaan pandangan terhadap satu situasi sosial budaya sehingga agak menimbulkan kesulitan ketika menghubungkan struktur dalam novel tersebut. Meskipun demikian, perlu diperhatikan adanya struktur yang kompleks sebagai salah satu syarat karya sastra besar. Menurut Goldmann karya sastra yang besar selalu merupakan tindakan yang historis, sebab mengekspresikan *image* yang global mengenai manusia dan alam. Tindakan semacam itu hanya mampu dilakukan atas struktur yang menyeluruh dari kelompok sosialnya (Goldmann melalui Atmaja, 1987: 16).

Atas dasar kondisi itulah dipertanyakan siapa yang bertindak dan memikirkan. Dalam menjawab pertanyaan inilah ditemukan sikap mental yang lebih rinci, penuh kesabaran, berkadar intelektual dan menunjukkan kecenderungan pada respon yang lebih masuk akal. Kategori mental ini, menurut Goldmann ada dalam kelompok sosialnya yang biasanya dalam bentuk kecenderungan yang disebutnya sebagai pandangan dunia. Oleh karena itu

pembicaraan tentang kelompok sosial dilakukan bersama-sama dengan pembicaraan mengenai pandangan dunianya. Dalam hubungan itulah novel merupakan suatu bentuk strukturasi yang konkret atas tanggapan pengarangnya terhadap situasi sekelilingnya, sebab pengarang sebagai manusia akan selalu berada dalam lintasan sejarah, sehingga dia merasa berkewajiban memahami lingkungan sosialnya, kemudian memberikan pandangan atas situasi sosial yang dialaminya.

Seperti yang telah diuraikan pada Bab II bahwa Mochtar Lubis adalah anak dari Raja Pandapotan Lubis, sedangkan ibunya adalah Siti Madinah Nasution. Kedua orang tua Mochtar Lubis adalah seorang bangsawan Mandailing. Dari garis keturunan, ayah Mochtar Lubis adalah seorang feodal, tetapi beliau tidak suka pada sikap feodal (Atmakusumah, 1992: 49). Pada saat ayahnya menjadi demang, Mochtar Lubis bisa bersikap bebas, namun ayahnya akan marah jika Mochtar Lubis menyalahgunakan kebebasan itu. Mochtar Lubis dididik dalam disiplin yang tegas. Sedangkan dari ibunya, ia selalu belajar tentang kebenaran. Sebagai anak keluarga ningrat yang ayahnya bekerja sebagai pamong praja, hidup Mochtar Lubis berkecukupan walaupun mereka keluarga besar, sepuluh bersaudara.

Apabila dilihat dari latar belakang pendidikannya, Mochtar Lubis termasuk salah satu di antara sebagian kecil masyarakat Indonesia yang pada masa itu sempat

menempuh pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Mochtar Lubis pernah mengikuti pendidikan di sekolah Rakyat hanya selama satu tahun, setelah itu pindah ke HIS, sekolah dasar berbahasa Belanda. Tahun 1935, ia sekolah Ekonomi di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Di sekolah ini dikembangkan semangat gerakan nasionalis, sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap sikap Mochtar Lubis. Seperti ketika ia menjadi guru di HIS di pulau Nias, dia terpaksa dikeluarkan oleh kontrolir Belanda agar meninggalkan pulau Nias karena Mochtar Lubis telah menyebarkan paham nasionalisme di sekolah itu. Akhirnya Mochtar Lubis memutuskan untuk merantau lebih jauh lagi dan bekerja di perusahaan farmasi, tetapi kemudian ia pindah ke Bank Factorij.

Beberapa tahun kemudian bala tentara Jepang masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 5 Maret 1942. Selama pendudukan militer Jepang itulah ia mulai mengenal dunia pers, walaupun belum memulai kariernya di bidang ini. Mochtar Lubis mulai sungguh-sungguh menekuni profesi jurnalistik pers sebagai wartawan setelah perang dunia kedua berakhir. Pada tahun 1949 Mochtar Lubis memimpin harian Indonesia Raya.

Dengan latar belakang kehidupan dan pendidikan seperti itu, jelas pengarang ini dapat dimasukkan ke dalam kelompok intelektual. Di Barat, kelompok intelektual ini tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok proletar atau kapitalis, melainkan kelompok tersendiri

yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sendiri pula, hal ini dikemukakan oleh Goulderner (Abdurrahman Wahid, 1981: 20). Berbeda dengan kelompok sosial lainnya, kelompok sosial Mochtar Lubis ini mempunyai pandangan dunia tersendiri yang khas bagi kelompoknya akibat persentuhannya dengan nilai-nilai kehidupan Barat lewat pendidikan yang sempat ditempuhnya.

Menurut Kartodirdjo, kelompok intelektual mempunyai beberapa fungsi yakni: (1) menginterpretasikan situasi masyarakatnya, (2) mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta memikirkan pemecahannya, (3) menjalankan kritik sosial untuk mendudukkan pelbagai perkara terlepas dari kepentingan tertentu, (4) menyatakan atau mengidentifikasi realitas sosial, dan (5) mengekspresikan kesadaran kolektif masyarakatnya (melalui Alfian ed. 1985: 18). Dari fungsi-fungsi tersebut jelaslah bahwa kelompok intelektual senantiasa bersikap sensitif dan suka mengkaji kehidupan sosial budaya dengan permasalahannya dalam segala kompleksitasnya. Disamping itu, mereka senantiasa bersikap serba kritis serta tidak bersikap hanya menerima saja.

Setelah Indonesia merdeka, kesempatan masyarakat Indonesia untuk memperoleh pendidikan menjadi terbuka lebar. Bukan hanya dari golongan priyayi, namun golongan kecil pun memiliki kesempatan itu. Keadaan tersebut menumbuhkan kelompok intelektual yang memiliki aneka ragam latar belakang. Kelompok intelektual terba-

g)-bagi atas kelompok-kelompok yang berbeda, (1) kelompok intelektual priyayi yang terikat pada birokrasi pemerintah yang bersifat membatasi dan menghambat daya pikir dan daya kritis mereka, kelompok ini disebut kelompok birokrasi modern (Kartodirdjo dkk., 1977: 153); (2) kelompok Islam yang dalam pencarian alternatif mungkin membawa mereka kembali kepada ikatan agama yang melatar belakangnya (Kartodirdjo dkk., 1977:128). (3) Kelompok intelektual merdeka. Kelompok kedua mempunyai pandangan yang hampir sama dengan kelompok ketiga, terutama dalam sikap politik mereka terhadap pemerintah kolonial. Kelompok kedua dan ketiga ini tidak didukung oleh legitimasi politik pemerintah sebagai kekuatan mereka, melainkan oleh keunggulan ilmu pengetahuan (Kartodirdjo, dkk., 1977: 153). Mereka mempunyai pemikiran yang lebih luas dan kritis bila dibandingkan dengan kelompok pertama.

Sejak mundurnya feodalisme di Jawa, mulai dengan pendudukan Jepang, strukturasi sosial Jawa telah mengalami perubahan. Menurut R.M. Koentjaraningrat, tingkat sosial dalam masyarakat Jawa dibedakan empat macam, yakni *ndara* (bangsawan), *priyayi* (birokrasi), *wong dagang* (saudagar), dan *wong cilik* (rakyat kecil) (melalui Muchtarom, 1988: 3-4). Para *ndara* umumnya berpusat pada empat kraton di bagian selatan Jawa Tengah, yakni: Kasunanan dan Mangkunegaran di Surakarta, serta Kasultanan dan Paku Alaman di Yogyakarta.

Anggota-anggotanya ialah orang yang dapat menunjukkan mereka keturunan para penguasa keempat swapraja tersebut menurut garis bapak atau ibu. Mereka terbagi menurut pangkat dan gelar yang berlainan sesuai dengan derajat kekerabatannya dengan salah satu di antara empat keluarga raja (melalui Muchtarom, 1988: 4).

Golongan priyayi mencakup para anggota dinas administratif, yaitu birokrasi pemerintah serta para cendekiawan yang berpendidikan akademis. Mereka menempati kedudukan pemerintah dan tersusun menurut tata-tingkat birokrasi, mulai dari priyayi rendah (seperti juru tulis, guru sekolah, pegawai kantor pos setempat, pegawai kereta api) sampai priyayi tinggi yang berpangkat tinggi di kota-kota yang agak besar (melalui Muchtarom, 1988: 4).

Hong dagang, yakni para saudagar dan pedagang kaki lima, lebih banyak berkumpul dalam kota-kota kecil atau dalam pemukiman-pemukiman kota besar, tempat terdapat pasar dan memainkan peranan penting sebagai lembaga ekonomi (melalui Muchtarom, 1988:5).

Hong cilik merupakan massa rakyat yang besar di desa dan pada lapisan-lapisan bawah penduduk kota. Kebanyakan *wong cilik* adalah tani yang tinggal di desa-desa yang merupakan satuan-satuan sosial, moral dan ekonomi. Namun ada juga *wong cilik* yang tinggal di kota. Di kota mereka merupakan tingkat bawah penduduk, bekerja sebagai pengemudi mobil, pemangkas rambut, dan

tukang kayu serta pembantu rumah tangga (melalui Muchtarom, 1988:6-7).

Setelah Indonesia merdeka para cendekiawan yang berpendidikan akademis menempati kedudukan-kedudukan tertinggi dalam pemerintahan. Pada saat ini mereka telah mengatasi golongan bangsawan dalam statusnya, kecuali dalam lingkungan keempat pusat keraton di Surakarta dan Yogyakarta (Muchtarom 1988:7).

Berdasarkan uraian tersebut, jika latar belakang kehidupan serta pendidikan Mochtar Lubis ditinjau, maka dapatlah dinyatakan bahwa Mochtar Lubis termasuk ke dalam kelompok intelektual yang merdeka.

Kelompok intelektual memiliki pandangan baru, yakni pandangan dunia modern. Pandangan dunia itu mencakup paham individualisme, liberalisme, dan rasionalisme. Pandangan dunia generasi sesudah kemerdekaan juga masih memperlihatkan usaha-usaha untuk menawarkan nilai-nilainya kepada masyarakat Indonesia. Misalnya, pernah dimuat pernyataan dari kelompok sastrawan Angkatan 45 yang disebut Surat Kepercayaan Gelanggang, berikut ini merupakan kutipannya:

Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur-baur dari mana dunia-dunia baru yang sehat dapat dilahirkan.

Ke-Indonesiaan kami tidak semata-mata karena kulit kami yang sawo matang, rambut kami yang hitam atau tulang pelipis kami yang menjorok ke depan, tapi lebih banyak oleh apa yang diutarakan oleh wujud pernyataan hati dan pikiran kami. Kami tidak

akan memberikan suatu kata-ikatan untuk kebudayaan Indonesia. Kalau kami berbicara tentang kebudayaan Indonesia, kami tidak ingat kepada melap-lap hasil kebudayaan lama sampai berkilat dan untuk dibanggakan, tetapi kami memikirkan suatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat. Kebudayaan Indonesia ditetapkan oleh kesatuan berbagai-bagai rangsang suara yang disebabkan oleh suara-suara yang dilonarkan dari segala dunia dan yang kemudian dilonarkan kembali dalam bentuk suara sendiri. Kami akan menentang segala usaha-usaha yang mempersempit dan menghalangi tidak betulnya pemeriksaan ukuran nilai.

Revolusi bagi kami ialah penempatan nilai-nilai baru atas nilai-nilai usaha yang harus dihancurkan. Demikianlah kami berpendapat bahwa revolusi di tanah air kami sendiri belum selesai.

Dalam penemuan kami, kami mungkin tidak selalu aseli; yang pokok ditemu itu ialah manusia. Dalam cara mencari, membahas dan menelaah kami membawa sifat sendiri.

Penghargaan kami terhadap keadaan keliling (masyarakat) adalah penghargaan orang-orang yang mengetahui adanya saling pengaruh antara masyarakat dan seniman (Rosidi, 1986: 85).

Kutipan di atas menunjukkan pandangan dunia pengarang angkatan 45 yang mengandung individualisme yang besar, liberalisme individu, dan objektivitas yang kuat. Bagi mereka dunia itu dapat diciptakan dalam bentuk yang mereka anggap benar dan sehat. Ikatan terhadap masyarakat bukan didasarkan pada ikatan subjektif melainkan objektif yang sesuai dengan hukum-hukum alam itu sendiri. Pandangan seperti itu terlihat pula dalam novel *Jalan Tak Ada Ujung*. Menurut Lubis (1977:37) individu adalah tujuan, bukan alat untuk mencapai tujuan, sehingga tidak boleh diletakkan di bawah negara. Untuk mencapai tujuan kebahagiaan Indonesia itu, maka dia harus dibebaskan untuk mengembangkan bakat dan cita-cita pribadinya (Lubis, 1977 : 33).

Itulah pandangan dunia kelompok intelektual Indonesia, khususnya kelompok intelektual yang merdeka. Pandangan itu dikemukakan di sini, karena Mochtar Lubis juga dapat dimasukkan ke dalam kelompok intelektual merdeka tersebut.

Adanya perbedaan pandangan dunia antara kelompok intelektual dengan masa rakyat, sering terjadi konflik antara keduanya, yang tidak hanya terlihat dalam skala besar seperti dalam kehidupan kenegaraan, tetapi juga dalam skala kecil dalam kehidupan sehari-hari yang konkret. Hal ini bisa menyebabkan kelompok Mochtar Lubis seringkali terdesak dari masyarakatnya. Kenyataan ini menimbulkan usaha untuk membangun pandangan dunia baru yang memungkinkan dapat menyatu dengan masyarakatnya. Usaha-usaha itu antara lain berupa perhatian yang besar terhadap rakyat kecil yang tanpa status dan masa depan.

4.1.2 Pandangan Dunia Mochtar Lubis

Pandangan dunia, menurut Goldmann (1977: 17-18) merupakan istilah yang cocok bagi kompleks menyeluruh dari gagasan-gagasan, inspirasi-inspirasi, dan perasaan-perasaan, yang menghubungkan secara bersama-sama anggota-anggota suatu kelompok sosial tertentu dan yang mempertentangkan dengan kelompok-kelompok sosial yang lain. Sebagai suatu kesadaran kolektif, pandangan dunia itu berkembang sebagai hasil dari situasi sosial dan

ekonomik tertentu yang dihadapi oleh subjek kolektif yang memilikinya.

Dalam novel *Senja*, Mochtar Lubis melontarkan gugatan terhadap masyarakat golongan kelas atas yang bertindak sewenang-wenang sehingga mengakibatkan penderitaan rakyat jelata, yang seringkali tersisih dalam kehidupan sosialnya. Lewat karya sastra (novel), Mochtar Lubis ingin berbicara atas nama hati nurani masyarakat. Nurani menghendaki keadilan. Sebagai sastrawan, Mochtar Lubis tidak bisa berpaling dari masalah-masalah kemiskinan, ketidakadilan, dan hak asasi manusia yang terinjak-injak. Ia selalu tergerak menulis apa yang dilihat dan dirasakannya, tanpa sedikit pun rasa takut (*Berita Buku*, Maret 1989).

Menurut Mochtar Lubis, pengarang harus ikut berperan dan bertanggung jawab dalam perjuangan manusia membina kehidupan yang lebih manusiawi (*Waspada*, 1 Januari 1980). Sebagai seorang pengarang Mochtar Lubis perlu senantiasa mempertajam kepekaannya pada nasib anak manusia terutama mereka yang terinjak dan diperkosa (*Waspada*, 1 Januari 1980).

Mochtar Lubis yang selama kurang lebih 30 tahun menjadi wartawan sekaligus pemimpin redaksi surat kabar *Indonesia Raya*, tidak hanya bergaul dengan kaum politisi dan penguasa besar, tetapi Mochtar Lubis juga bergaul dengan masyarakat kalangan bawah. Dengan demikian Mochtar Lubis tahu apa yang menjadi kepiluan, kesenangan,

kebanggaan, kekecewaan, dan mimpi-mimpi mereka. Semua itu telah direkam dalam pikiran dan perasaannya (*Berita Buku*, 1992: Maret). Oleh karena itu melalui surat kabar *Indonesia Raya*, Mochtar Lubis tidak segan-segan mengungkapkan masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, ketidakadilan, dan feodalisme dalam sikap manusia. Karena keberanian dan seringnya Mochtar Lubis mengungkapkan tindak kejahatan, ia telah dijuluki sebagai wartawan jihad (Atmakusumah, 1992: 23).

Mochtar Lubis selalu berjuang untuk nasib rakyat kecil yang tidak terbela melawan *mismanagement* negara oleh pemimpin-pemimpin yang mabuk kekuasaan dan harta duniawi. Untuk itu Mochtar Lubis merasa yakin bahwa para pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaannya dan yang selalu bicara atas nama rakyat, tetapi tidak bekerja untuk rakyat, pada akhirnya akan diganjar sesuai dengan perbuatannya. Dalam novel *SdJ*, pandangan seperti ini tercermin melalui tokoh-tokoh kalangan atas yang akhirnya mengalami nasib sesuai dengan perbuatannya.

Pandangan tersebut diyakini dan dijadikan sebagai pedoman hidup oleh Mochtar Lubis, bahwa kebenaran akan berhasil melawan yang batil, membongkar yang palsu, dan melawan penyalahgunaan kekuasaan (Atmakusumah, 1992: 96).

Di samping pandangan tersebut, dijumpai pula pandangan bahwa manusia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan dirinya sendiri sehingga ia ikut merasa

bertanggung jawab terhadap bangsanya. Hal ini tercermin melalui tokoh Pranoto, demi membela kepentingan seluruh bangsa dan negara, ia rela mengorbankan cintanya (SdJ, hlm. 167).

Di dalam novel *SdJ* ini, Mochtar Lubis banyak mengkritik tindakan para penguasa yang dianggapnya tidak benar. Mochtar Lubis ingin menegakkan hukum dan keadilan, sehingga ia tidak takut mengungkapkan kebenaran secara terbuka (Atmakusumah, 1992: 24).

Melalui kritik-kritiknya, Mochtar Lubis juga berusaha untuk mengikis nilai-nilai feodal yang telah menghinggapi masyarakat Indonesia. Menurut Mochtar Lubis, bangsa Indonesia tidak akan berkembang jika sikap feodalisme masih ada, misalnya orang menaruh hormat pada orang lain karena status pangkat dan kejayaannya, bukan karena keluhuran budi pekerti dan kejujuran (*Suara Pembaruan*, 1989: Januari). Dan untuk menanamkan nilai-nilai yang positif, generasi terdahulu harus memberikan contoh yang baik, yang pantas ditiru oleh generasi berikutnya. Generasi tua jangan memberikan contoh kebobrokan moral dan kerancuan nilai, jika mengharapkan kemauan baik yang mencintai kejujuran dan keluhuran budi pekerti (*Suara Pembaruan*, 1989: Januari).

Melalui novel *SdJ*, Mochtar Lubis juga banyak melontarkan kritik-kritiknya, seperti tentang kepincangan-kepincangan sosial yang terjadi di Indonesia (SdJ, hlm. 172). Mochtar Lubis mencoba membenturkan dua golongan

masyarakat, yaitu golongan elite yang curang, munafik, dan pengecut dengan masyarakat kelas bawah yang jujur dan lugu. Kemudian tentang kebobrokan moral para pemimpin partai yang menguasai pemerintahan waktu itu juga dapat dilihat melalui adegan Raden Kaslan yang merasa ketakutan mobilnya dikenal oleh wartawan, sementara dia sedang main perempuan di rumah Tante Dep. Moral para pemimpin yang sudah rusak ini dengan sendirinya membawa malapetaka pada rakyat yang dipimpinnya (SdJ, hlm. 222).

Kemudian paham nasionalisme yang sudah tertanam dalam jiwa Mochtar Lubis juga tercermin dalam beberapa karyanya seperti *Jalan Tak Ada Ujung* dan *SdJ*. Pada novel *SdJ* melalui tokoh Pranoto, tampak kritik-kritik Mochtar Lubis tentang semboyan nasionalisme yang disalahgunakan oleh para pemimpin. Untuk lebih memperjelas pernyataan tersebut, berikut ini kutipan dari dialog tokoh Pranoto pada forum diskusi:

Kini terlalu banyak pemimpin yang masih melontarkan semboyan nasionalisme, tapi kelihatan dalam praktek nasionalism tidak memberikan isi pada tujuan-tujuan kemerdekaan yang dahulu kita maksud. Apalagi nasionalisme yang oleh banyak pemimpin kita sampai sekarang masih dipuja-puja itu bercampur aduk dengan sikap jiwa dan pikiran yang irasional, mereka campur-baur dengan mitos-mitos dan pemujaan pada yang heroik-heroik.

Usaha-usaha pemimpin lebih diberatkan hendak mendirikan tugu-tugu nasional raksasa, pencarian yang dilakukan mereka untuk mendapat macam-macam mitos, kecurigaan yang berlebih-lebihan pada luar negeri, ketakutan yang dibuat-buat terhadap aksi-aksi subversif asing, agen-agen kapitalis dan imperialis yang di sorot ke mata rakyat seakan mengancam setiap saat dari setiap sudut adalah gejala kehampaan semboyan-semboyan nasionalisme yang tidak lagi mempunyai kreatif.

Akibatnya semua rakyat menjadi lesu dan tidak perdu-

li, banyak orang jadi sinis, dis integrasi lalu memuncak. Karena itu harus dicari pedoman baru untuk rakyat. Satu-satunya pedoman baru yang dapat menimbulkan kegembiraan kembali pada rakyat ialah jika kita bisa membuktikan bahwa sungguh-sungguh dimulai dan dilakukan kerja untuk memberikan penghidupan yang baik dan layak pada rakyat itu. Nilai uang yang merosot terus-menerus segera dapat diperbaiki, pekerjaan-pekerjaan pembangunan harus ditujukan untuk meninggikan kemakmuran rakyat, dan bukan untuk memperkaya beberapa gelintir pemimpin belaka (SdJ, hlm. 285-286).

Dalam uraian tersebut di atas, tercerminlah pandangan pengarang yang ingin mengadakan pembaruan terhadap sikap masyarakat Indonesia, khususnya pada mereka yang kurang bertanggung jawab sebagai pemimpin.

Pandangan dunia Mochtar Lubis yang tercermin di dalam novel *SdJ* tersebut tidak hanya terwakili oleh seorang tokoh saja, melainkan juga melalui tokoh-tokoh yang lain, seperti tokoh Murhalim yang membawakan ideologi Islam, secara samar-samar Mochtar Lubis sering muncul. Hal ini bisa dilihat melalui perdebatan ideologi antara golongan demokrasi dengan golongan komunis, seperti yang tercermin melalui kutipan berikut:

"Saudara Akhmad ini anti agama sama sekali," sela Murhalim. "Saudara memakai klise-klise komunisme untuk mengeritik agama. Yang dimaksud Ies yaitu mencari dan memperkembangkan nilai-nilai yang selama ini terpendam mati, supaya diberi napas hidup yang baru. Ini persoalan yang dimajukan Ies dan pertanyaannya, apa bisa agama Islam dengan dinamik baru dipakai sebagai pegangan untuk membangun bangsa kita? Pertanyaan ini dimajukan, karena saya percaya, kecuali Saudara Akhmad, maka kita semua di sini menolak komunisme dengan sistem totaliternya sebagai satu-satunya cara untuk membangun bangsa kita" (SdJ, hlm. 49-50).

Pada prinsipnya, secara keseluruhan struktur novel *SdJ* disatukan oleh pandangan tentang keselarasan hidup

manusia dalam masyarakatnya. Pandangan tersebut merupakan ekspresi dari pengarang besar yang mencoba untuk mengimplisitkan pandangan dunianya melalui sebuah karya sastra.

Demikianlah analisis kelompok sosial pengarang dan pandangan dunianya.

4.2 Kondisi Sosial yang Terbayang dalam Teks

Setelah dilakukan analisis struktur atas novel *SdJ* dan melihat pandangan dunia kelompok sosial pengarang, dapatlah dinyatakan bahwa keadaan yang dilukiskan pengarang dalam *SdJ* menunjukkan relevansinya dengan kondisi sosial dan politik di Indonesia.

Ide cerita novel *SdJ* tersebut telah ada dalam angan-angan pengarang selama ia berstatus sebagai tahanan masa rezim Soekarno. Pengarang baru menulis novel *SdJ* pada bulan Desember 1958 dan telah selesai pada bulan Nopember 1960 (Lubis, 1987:111-116). Penggambaran peristiwa dalam novel *SdJ* secara eksplisit memang tidak disebutkan latar waktunya, namun melalui beberapa insiden dalam novel tersebut, pengarang telah memaparkan kisah yang sebagiannya berdasarkan peristiwa nyata. Melalui novel *SdJ* kita dapat melihat perjalanan sejarah nasional selama masa hidup Mochtar Lubis.

Peristiwa yang sangat berpengaruh terhadap latar belakang penciptaan novel *SdJ* adalah masa penahanan yang pernah terjadi pada diri Mochtar Lubis. Pada masa pena-

hanan selama sembilan setengah tahun tanpa pemeriksaan pengadilan telah membuat Mochtar Lubis menyelesaikan empat novel, yaitu novel *SdJ*, *Tanah gersang*, *Harimau-Harimau*, serta *Maut dan Cinta* (Atmakusumah, 1992: 229).

Seperti yang telah dijelaskan pada analisis intrinsik, bahwa novel *SdJ* ini menampilkan berbagai masalah, misalnya tentang : (1) sistem pemerintahan, (2) konflik (pertentangan) ideologi antar partai, (3) korupsi dan sikap munafik para pejabat, (4) perbedaan tingkatan sosial atau ekonomi masyarakat Indonesia sesudah perang, serta (5) masalah kebudayaan nasional dan kebudayaan Barat.

Dari beberapa masalah yang ada, kisah yang berlatar belakang sejarah nasional terutama berkaitan dengan masa pemerintahan presiden Soekarno. Tahun-tahun pertama dari periode apa yang disebut sebagai demokrasi liberal, yaitu tahun-tahun permulaan 1950-an. Kita masih mencatat suasana kerukunan dan persatuan nasional yang relatif baik dan dapat diandalkan. Dalam tahun-tahun ini terlihat suatu koalisi dan kerjasama yang harmonis antara unsur-unsur sosial demokrat dalam PNI, Masyumi, dan PKI.

Sesudah itu sistem politik Indonesia mulai lebih banyak mengalami ketegangan-ketegangan dan krisis-krisis yang menjurus kepada suatu proses kemerosotan politik dan ekonomi. Partai-partai dan pemimpin-pemimpin mulai sering bercekcok, sehingga menimbulkan suatu suasana politik yang penuh dengan perasaan saling curiga, saling

tidak percaya, saling memborong kebenaran sendiri, saling tuduh menuduh dan saling mengkam-bing-hitamkan. Pada hakikatnya suasana seperti ini boleh dikatakan telah menimbulkan suatu kemunduran kualitas dari sistem politik yang ada, konsensus yang diperlukan untuk bergerak maju jarang sekali dapat dicapai.

Bercerainya PNI dengan Masyumi dan PSI merupakan sebagian dari penyebab proses kemerosotan politik, tetapi itu bukan satu-satunya faktor. Faktor-faktor yang lain ialah kenyataan bahwa sistem politik yang ada dan yang belum begitu kokoh terpaksa harus menjalani goncang-goncangan perdebatan tajam mengenai dasar ideologi yang harus melandasinya. Pada masa itu ditunjukkan betapa tajamnya perdebatan atau pertentangan antar ideologi (Alfian, 1981: 5).

Dalam *SdJ*, keadaan tersebut tercermin melalui peristiwa perdebatan antara kelompok intelektual dalam setiap forum diskusi yang diselenggarakan oleh Pranoto dan kawan-kawannya. Akhmad adalah salah satu diantara tokoh yang berideologi komunis, sehingga dalam setiap argumentasinya selalu dikaitkan dengan ajaran Marx dan Engels (*SdJ*, hlm.44). Dalam pembicaraan yang berkaitan dengan kebudayaan Nasional, Akhmad sangat mendukung rencana Yasrin, seorang tokoh yang ingin mempelajari bagaimana di RRT orang memperkembangkan kebudayaan rakyat (*SdJ*, hlm. 43). Dalam hal ini Iesye dan Murhalim yang menjunjung tinggi sistem demokrasi nasionalisme menentang

Akhmad, karena apa yang ada di RRT belum tentu bisa dilakukan di Indonesia. Perdebatan antara tokoh-tokoh yang mewakili dua golongan ini dapat dilihat melalui kutipan berikut :

"Di RRT yang berkuasa kaum komunis, dan semua dijalankan secara diktator. Kita di Indonesia menjunjung tinggi demokrasi!" (SdJ, hlm.44).

"Apa arti demokrasi bagi bangsa Indonesia sekarang?" tanya Akhmad, "Itu suara kaum borjuis yang hendak menguasai massa rakyat yang bodoh dan melarat. Apa keadaan sekarang demokrasi? Apa bangsa kita sudah menjalankan demokrasi? jawablah secara jujur!" (SdJ, hlm. 44).

Dalam benturan ideologi antara golongan demokrasi dengan golongan komunis, pribadi Mochtar Lubis sering muncul melalui tokoh Pranoto, seperti yang terlihat melalui kutipan berikut :

"Jika saudara Akhmad meneruskan pemikiran berdasarkan praktek kaum komunis di Rusia, maka kita tidak akan habis-habisnya berdebat. Pada hemat saya kita semua berkumpul di sini sebagai pendukung-pendukung paham kerakyatan atau demokrasi, dan menolak sistem totaliter, baik dia berupa fasisme atau komunisme sebagai cara membangun dan memajukan bangsa kita" (SdJ, hlm.100).

Dengan adanya perdebatan pendapat antara Akhmad yang berideologi komunis dengan Pranoto dan kawan-kawannya yang menjunjung tinggi sistem demokrasi, menyebabkan perpecahan di antara mereka. Akhmad terpaksa harus keluar dari kelompok diskusi yang dipimpin oleh Pranoto karena dianggapnya tidak sepaham.

Keadaan seperti itu memberikan gambaran tentang kondisi politik di Indonesia yang masih belum stabil. Pertentangan ideologi semakin memuncak. Menurut Arbi

Sanit (1981: 48-49), pada dasarnya faktor ideologi inilah yang menjadi dasar pokok pertikaian di antara partai-partai di Indonesia. Kelemahan lain dari peranan ideologi di dalam kehidupan partai mungkin berpangkal kepada penggunaan ideologi sebagai alat pengukur tingkah laku politik, bukan hanya sebagai gambaran dari kehidupan manusia secara individual dan berkelompok. Oleh karena itu sistem politik demokrasi liberal parlementer yang diterapkan pada suatu masa yang belum memiliki kesadaran politik nasional yang tinggi dapat mengakibatkan bangsa dan negara itu menjadi pecah. Hal ini terbukti di dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, dimana terdapat pemberontakan-pemberontakan yang disebabkan latar belakang ideologi politik dan kepentingan-kepentingan ekonomi yang berbeda satu sama lain (Sukarna, 1990: 16).

Salah satu hal lagi yang menyebabkan merosotnya politik ialah perkembangan pendidikan yang relatif pesat berjalan tidak seimbang dengan kemampuan untuk menyediakan pekerjaan buat para tamatan. Partai-partai yang membutuhkan tenaga-tenaga aktivis buat mengembangkan ilmu dan pengaruhnya merupakan tempat pelarian yang baik bagi sejumlah para tamatan. Sebagai imbalan dari jasa-jasa mereka kepada partai, tokoh-tokoh politiknya sudah tentu berusaha untuk memberikan pekerjaan-pekerjaan kepada mereka. Akibatnya kalau partai-partai mempunyai kesempatan memegang departemen-departemen atau kement-

rian-kementerian, maka sering kesempatan tersebut disalahgunakan untuk memasukkan aktivis-aktivis partai ke dalam birokrasi departemen-departemen tersebut. Dari sini mulailah terjadi korupsi kekuasaan, yaitu penyalahgunaan wewenang oleh sebagian tokoh-tokoh dalam mengangkat pegawai-pegawai baru atas dasar loyalitas partai, bukan atas dasar kecakapan yang objektif. Lebih jelek lagi, kadang-kadang pengangkatan pegawai-pegawai baru bukan lagi di dasarkan atas kebutuhan pekerjaan secara rasional, melainkan atas kebutuhan partai untuk menempatkan orang-orangnya. Kejadian seperti ini di negara-negara Barat disebut sistem pamanjaan (*spoil system*) (Alfian, 1981: 7).

Dalam *SdJ*, keadaan tersebut tercermin melalui beberapa tokoh yang berkedudukan sebagai ketua partai dan beberapa anggota partai. Misalnya, Husin Limbara sebagai ketua partai, dengan mudahnya mengangkat kedudukan Halim, seorang wartawan untuk menjadi anggota partai, dan bekerja bukan di dasarkan atas kebutuhan pekerjaan secara rasional, melainkan untuk melindungi partai dari serangan oposisi. Demikian juga dengan Raden Kaslan yang telah menempatkan anak dan istrinya sebagai direktur dengan memegang N.V di beberapa tempat (*SdJ*, hlm. 69). Dengan masuknya mereka menjadi anggota partai, kegiatan mereka yang korup seakan-akan dapat terlindungi. Hal ini sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Sugeng seperti pada kutipan berikut:

"Ah, saya masuk hanya untuk mencari perlindungan," kata Sugeng pada dirinya sendiri... (SdJ, hlm. 123).

Korupsi adalah masalah yang paling dominan disoroti oleh Mochtar Lubis. Oleh karena itu dia pernah ditahan selama sembilan setengah tahun pada masa rezim Soekarno karena keberaniannya mengkritik. Menurut H. Budiarmo (melalui Atmakusumah, 1992: 24) dalam melakukan kritik tersebut Mochtar Lubis tidak mengenal tempat dan tidak peduli dengan siapa ia berhadapan. Misalnya, melalui surat kabar *Indonesia Raya*, Mochtar Lubis pernah mengkritik korupsi di perusahaan minyak Indonesia (Pertamina). Kemudian menyiarkan berita tentang kasus menteri Luar Negeri Roeslan Abdulgani yang terlibat korupsi dengan Lie Hok Thay (Atmakusumah, 1992: 70).

Indonesia Raya juga pernah memuat pemberitaan tentang "lisensi istimewa", peraturan yang dibuat oleh Menteri Perekonomian Iskaq Tjokroadisurjo untuk menghimpun dana bagi partainya, partai Nasional Indonesia (PNI). Perusahaan yang memperoleh lisensi dagang memberikan sumbangan kepada partai dengan cara mendepositokan dana pada bank-bank yang dipimpin orang-orang partai. Atau menggunakan wakil-wakil partai yang bertugas di perwakilan diplomatik di luar negeri untuk menyalurkan bisnis kepada para pengimpor yang mendukung partainya. Peristiwa itu terjadi selama kabinet Ali Sastroamidjojo pertama (1953-1955), tetapi baru diperiksa oleh pengadilan tahun 1959-1960 ketika *Indonesia Raya* sudah tidak

ada lagi. Mantan menteri Iskaq dijatuhi hukuman oleh pengadilan (Atmakusumah, 1992: 69).

Peristiwa terbogkarnya lisensi istimewa tersebut di atas dengan jelas tercermin dalam SdJ melalui tindakan beberapa tokoh yang berkedudukan sebagai dewan partai Indonesia, seperti Husin Limbara, Raden Kaslan, Sugeng, dan Halim.

Untuk menghimpun dana bagi partainya, Husin Limbara mengadakan organisasi dagang untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini Husin Limbara memilih Raden Kaslan yang sudah lama bergerak dalam dunia perdagangan. Hal ini dimaksudkan agar rencana yang telah disusunnya bisa berjalan dengan lancar. Kutipan berikut ini akan dapat memperjelas kondisi tersebut :

Sebagai saudara tahu, pemilihan umum sudah dekat. Partai kita perlu banyak uang. Kita perlu mengadakan organisasi dagang untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Dan saudara terpilih untuk membuat rencana ini, karena saudara sejak lama sudah bergerak dalam dunia perdagangan. Saudara buatlah rencana yang sungguh-sungguh besar, meliputi seluruh kegiatan perekonomian. Soal uang saudara jangan hiraukan, kita bermaksud akan berdagang sungguh-sungguh. Anggota-anggota kita yang memegang kekuatan telah mendapat instruksi untuk membantu usaha partai ini (SdJ, hlm. 65).

"Jika anggota-anggota partai kita yang memegang kekuasaan memberikan bantuannya, maka soal ini tidak begitu susah," kata Raden Kaslan. "Dari sektor perekonomian yang paling mudah dan cepat mendapat uang tentulah sektor impor. Kalau sektor-sektor lain minta waktu, minta organisasi, minta tenaga, seperti sektor pengangkutan, atau ekspor, atau industri. Akan tetapi sektor impor, tidak perlu apa-apa. Hanya perlu nama satu N.V, habis, tidak ada lagi. Kita jual saja lisensi-lisensi impor yang dapat. Saya usulkan kita buat dua rencana. Satu rencana cepat, ialah melalui sektor impor, dan sebuah lagi rencana permanen, umpamanya mendirikan bank-bank, industri-

industri dan sebagainya (SdJ, hlm. 66).

Untuk mencari dana buat kepentingan partai dan pribadi, Husin Limbara berusaha mengatur rencana-rencananya serapi mungkin agar tidak diketahui massa. Selain memilih Raden Kaslan yang bergerak dalam bidang perdagangan, Husin Limbara juga menunjuk Sugeng yang bekerja di Kementerian Perekonomian untuk dinaikkan pangkatnya dan menjabat bagian pemberian lisensi-lisensi. Sugeng yang telah masuk anggota partai itu, akhirnya memanfaatkan kedudukannya demi kepentingan pribadi dan golongan.

Selanjutnya untuk menghindari golongan-golongan oposisi yang telah melancarkan serangan-serangan pada pemberian lisensi-lisensi istimewa, Husin Limbara telah memilih Halim, seorang wartawan yang berkewajiban menentang semua serangan tersebut (SdJ, hlm. 123). Seperti halnya Sugeng dan kawan-kawannya, Halim juga berusaha memanfaatkan kedudukannya untuk memperkaya dirinya sendiri. Berikut ini merupakan kutipan yang menunjukkan keculasan hati Halim :

... dan Halim menatap mata Raden Kaslan sebentar, penuh arti. Seakan dia hendak berkata, jika tidak engkau beri pinjaman, engkau tahu sendiri, engkau dan partaimu itu aku tidak akan bantu! Dan semua rahasia-rahasiamu ada dalam tanganku (SdJ, hlm.86 hlm. 86).

Dari kutipan tersebut menunjukkan bahwa mereka yang telah masuk sebagai anggota partai ternyata tidak sepenuhnya bekerja untuk kepentingan partai, melainkan juga untuk kepentingan pribadi. Dalam kondisi seperti inilah

para pemimpin dan anggota partai dapat memperkaya dirinya. Kondisi seperti ini dapat dilihat melalui kutipan berikut:

Melihat anggota-anggota dewan partai yang hadir itu Halim merasakan sekali betapa hampir semuanya mereka mendapat kedudukan yang memberikan penghasilan yang besar-besar, baik sebagai direktur-direktur perusahaan sendirisendiri, atau sebagai direktur dan komisaris perusahaan kepunyaan negara (SdJ, hlm. 229).

Meskipun rencana pencarian dana tersebut telah diatur serapi mungkin agar tidak diketahui massa, namun akhirnya kerja sama mereka dapat diketahui juga oleh pihak oposisi, seperti yang terdapat pada kutipan berikut:

Surat kabar yang terbit petang di Jakarta, tanggal 25 Januari itu mengumumkan penangkapan beberapa orang pegawai kementerian perekonomian, di antaranya seorang bernama S yang telah berhenti dan mempunyai perusahaan sendiri, dan juga diumumkan bahwa pihak yang berwajib telah mengirim kawat kepada kedutaan-kedutaan Republik Indonesia di luar negeri menyuruh pulang kembali Raden Kaslan (SdJ, hlm. 269).

Dalam berita tersebut selanjutnya disebutkan bahwa polisi juga telah membongkar banyak manipulasi lisensi dan mendapat pengakuan di dalam kementerian perekonomian, dan Raden Kaslan, seorang tokoh partai yang terkenal, telah dipanggil pulang untuk diminta keterangannya mengenai beberapa soal yang sedang dalam penyelidikan polisi (SdJ, hlm. 270).

Akibat dari tingkah laku yang tidak wajar dari ketua partai dan beberapa anggotanya yang telah mengadakan perampokan secara besar-besaran terhadap rakyat (SdJ, hlm. 161), berpengaruh terhadap keadaan ekonomi pada

masa itu, dimana gap atau kesenjangan sosial pada saat itu sangat tampak. Mereka yang kaya bertambah kaya, yang berkuasa tambah berkuasa, dan yang miskin tambah menderita (SdJ, hlm. 223). Dengan demikian tampak bahwa partai-partai politik dan massa rakyat hanya dijadikan alat oleh orang-orang yang "mabuk" kekuasaan (Cf. Geertz, 1977: 15). Kecenderungan-kecenderungan partai yang semacam ini menyebabkan berjatuhnya kabinet-kabinet tanpa sempat merealisasikan program-programnya (Feith, 1978: 41). Umur kabinet sebelum pemilu 1955 rata-rata hanya delapan bulan. Perkembangan ekonomi dan politik terhambat, karena pemerintah tidak sempat melaksanakan programnya (Sudiardjo, 1977: 69-70).

Rasa tidak puas massa terhadap pemerintah dan partai-partai yang berkuasa semakin meningkat, karena kesulitan-kesulitan persediaan beras, garam, dan minyak tanah (SdJ, hlm.224). Tidak stabilnya keadaan ekonomi pada masa itu semakin mengacaukan pikiran masyarakat kelas bawah ketika ada sebuah partai politik yang hendak mengacaukan keadaan buat kabinet baru. Keadaan seperti itu dapat dilihat melalui kutipan berikut :

Kabinet baru bersungguh-sungguh hendak menjalankan pemberantasan korupsi, maka oposisi terhadap kabinet baru telah melancarkan kampanye yang hebat, dan menimpakan kesalahan pada kabinet baru ini mengenai kekurangan beras, garam, dan minyak tanah. Di kampung-kampung menjalar kampanye bisikan, bahwa persediaan beras, garam, dan minyak tanah dalam beberapa hari akan habis di warung-warung, dan supaya orang ramai-ramai membeli sebelum terlambat (SdJ, hlm. 271).

Itam bercerita kepada Saimun, bahwa padanya dan kawan-kawannya tukang beca telah datang orang-orang yang tidak mereka kenal, akan tetapi mengatakan pada mereka, bahwa mereka harus bercerita pada semua orang kampung mereka untuk cepat-cepat dan ramai-ramai membeli beras, garam, dan minyak tanah (SdJ, hlm. 271).

Kekacauan keadaan ekonomi yang disebabkan oleh kondisi politik pada masa itu, mengakibatkan rakyat kecil yang telah dipengaruhi agar antri membeli beras dan minyak tanah tidak dapat dikendalikan. Sehingga kematian Murhalim sebagai pembawa ideologi Islam dan Itam sebagai rakyat kecil adalah sebuah lukisan ironis dari kehidupan partai masa itu. Murhalim meninggal untuk menunjukkan kebolehnya sebagai pembawa ideologi Islam, sedangkan Itam adalah korban suatu golongan dengan dalih membela hak-hak rakyat. Melalui lukisan ini, Mochtar Lubis hendak menyampaikan suatu pesan bahwa setiap partai cenderung memperalat massanya dengan alat situasi atau kondisi lingkungannya. Janji-janji partai tidak pernah bersih dari propokasi. Keironisan Mochtar Lubis terlukis melalui kutipan berikut:

"Sekarang mereka berdua berbaring bersama-sama hendak membela nasib rakyat kecil. Kini dalam kematian mereka berdua bertemu dan bersatu, yang terinjak telah melawan dan yang melawan telah terinjak (SdJ, hlm. 269).

Selain kondisi perekonomian, masalah kebudayaan juga disoroti pula oleh Mochtar Lubis. Seperti yang telah dijelaskan pada analisis sebelumnya, bahwa masalah kebudayaan telah dijadikan topik utama dalam setiap

forum diskusi.

Sekitar tahun 1930-an, ada dua pendapat yang muncul, apakah kebudayaan Indonesia itu mencontoh Barat, atau tetap kembali kepada kebudayaan sendiri, yaitu kebudayaan Timur?. Golongan yang memihak Barat berpendapat bahwa kebudayaan Indonesia yang baru itu dalam segala hal harus meniru Barat, sedang yang memihak Timur berpendapat bahwa kebudayaan baru Indonesia tidak boleh meninggalkan sama sekali warisan kebudayaan sendiri (Sumardjo, 1992: 77). Pertentangan antara keduanya meluas di luar lingkungan pujangga baru. Banyak kaum intelektual yang terlibat. Polemik tersebut dikenal sebagai polemik kebudayaan. Adapun pokok-pokok pendapat dalam polemik tersebut ialah, Sutan Takdir Alisjahbana adalah tokoh utama yang mengagungkan kebudayaan barat. Menurut Sutan Takdir Alisjahbana, generasi muda harus melihat ke depan, menuju apa yang hendak dikejanya dan bukan menoleh ke belakang memandangi apa yang ditinggalkannya. Tetapi dia juga menyebutkan bahwa generasi baru boleh saja mengetahui kebudayaan lama, tetapi jangan terikat kepada kebudayaan lama. Takdir menyelidiki apa yang menjadikan dunia Barat dapat mencapai tingkat kemajuan yang tinggi.

Sebagai penentang pendapat Sutan Takdir Alisjahbana, Sanusi Pane berpendapat bahwa Barat terlalu mementingkan jasmani dan melupakan rohani. Akal Barat dipakai untuk menakhlukkan alam. Barat bersifat seperti faust yang

mengorbankan jiwanya demi kenikmatan duniawi. Timur seperti Arjuna yang mempergunakan otaknya untuk mempersatukan dirinya dengan alam. Yang ideal menurut Sanusi Pane adalah menggabungkan faust dengan arjuna, artinya memesrakan materialisme, intelektualisme, individualisme dengan spiritualisme, perasaan dan kolektivisme (Sumardjo, 1992: 78).

Dalam *SdJ* masalah kebudayaan yang pada tahun 1950-an itu masih ramai diperdebatkan oleh kalangan intelektual Indonesia, tercermin melalui tokoh-tokohnya. Masalah kebudayaan Barat dan peranannya bagi pertumbuhan kebudayaan nasional dijadikan topik utama dalam kelompok diskusi antara Pranoto dan kawan-kawannya. Dalam pembicaraan tentang fungsi kebudayaan dalam pembangunan, ada beberapa tokoh yang saling mempertahankan ideologinya, misalnya Akhmad yang selalu berpegang pada historis-materialisme selalu menganjurkan agar dalam membicarakan krisis kebudayaan, sebaiknya dikaitkan dengan pembicaraan tentang sistem perekonomian. Perkembangan-perkembangan politik, hukum, falsafah, agama, kesusastraan, kesenian dan sebagainya berdasar pada perkembangan ekonomis. Hal ini disesuaikan dengan pemikiran Engels (*SdJ*, hlm. 46). Untuk itu Akhmad sangat setuju jika Yasrin belajar di RRT untuk mengetahui bagaimana kebudayaan rakyatnya.

Pendapat Akhmad yang demikian ini ditentang oleh Murhalim, karena marxisme sebagai yang dipraktikkan

orang komunis bukanlah membawa pembebasan dan kebahagiaan pada manusia, akan tetapi pada akhirnya membawa perbudakan dan kecelakaan kemanusiaan. Sedangkan Murhalim sendiri memberikan komentarnya bahwa meskipun masalah kaum intelek bangsa Indonesia ada kaitannya dengan teknologi Barat, akan tetapi itu terlalu diberi aksentuasi tersendiri, artinya bangsa Indonesia seakan terpesona oleh Barat dan tiap-tiap pikiran selalu diarahkan ke Barat. Hal inilah yang dapat menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Bagi Murhalim, kemajuan dengan Barat ini salah meletakkan aksennya, sedangkan Islam mempunyai nilai-nilai dan dinamik untuk menyusun negara modern (SdJ, hlm. 143). Berdasarkan konsep yang demikian, Murhalim menghendaki agar tidak dipergunakan istilah Barat, karena mudah menimbulkan prasangka yang bukan-bukan. Sebagai penggantinya digunakan istilah teknologi modern, karena tidak membangunkan reaksi-reaksi yang biasanya timbul jika mendengar kata Barat (SdJ, hlm. 144).

Dalam masalah tentang kebudayaan ini, Mochtar Lubis membuat semacam keputusan tegas melalui tokoh Pranoto, yaitu kebudayaan Barat harus diterima secara utuh, namun penerapannya harus selektif dan bervariasi. Hal ini seperti yang tercermin melalui kutipan berikut:

"Soal utama dalam menghadapi teknik Barat ini bagi bangsa kita, "kata Pranoto, "ialah kita tidak diberi waktu, tidak ada masa peralihan. Atau kita terima dan pergunakan teknologi Barat itu, atau kita akan tetap terus tinggal terbelakang dalam kemajuan dunia. Bukan saja teknologi Barat harus kita terima

dan pergunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani rakyat, seperti memperbesar produksi bahan makanan, akan tetapi juga untuk menjamin kemerdekaan bangsa kita, kita harus memakai teknologi Barat ini. Pada hakikatnya soalnya dapat disimpulkan antara 'to be' atau 'not to be' bangsa kita. Jika kita hendak memelihara penghidupan bangsa kita sebagai bangsa yang kuat dan merdeka, maka kita harus menerima teknologi Barat. Menolak teknologi Barat berarti kita menjatuhkan hukuman mati bagi bangsa kita sendiri. Dalam menghadapi pilihan ini kita lihat banyak kaum intelektual Indonesia merasa ragu-ragu. Ada yang menolak sama sekali, karena melihat unsur-unsur penghidupan Barat yang tidak sesuai dengan jiwa ketimuran mereka, dan mereka menganggap bahwa unsur-unsur penghidupan Barat itu (yang untuk sebagian ada benarnya pula) merupakan ancaman bagi susunan masyarakat kita sekarang. Ada yang berpendirian mau mengambil yang baik-baik dan bermanfaat saja, dan menolak unsur-unsur yang tidak disukai dari Barat. Saya berpendapat, bahwa kita harus menerima semuanya, yang baik dan yang kita anggap bermanfaat, dan biarkan dalam proses pertumbuhannya daya kreasi bangsa kita menentukan sendiri." (SdJ, hlm. 141-142).

Dalam perdebatan tentang kebudayaan tersebut, kelihatan seakan-akan antara Timur dan Barat dipertentangkan secara tajam oleh kedua belah pihak. Murhajim, yang mewakili kelompok tradisional, berpegang pada nilai-nilai budaya nenek moyang, budaya ini masih cukup mempunyai nilai-nilai yang dapat memberikan kekuatan kebudayaan bangsa Indonesia untuk menghadapi dunia.

Sebaliknya, Akhmad yang mewakili kelompok modern mengatakan bahwa budaya tradisional kita dalam sejarah telah terbukti tidak mampu menghadapi kekuatan budaya yang datang dari Barat, karena itu bangsa Indonesia jatuh di bawah telapak kaki penjajah Belanda. Jika hendak memajukan bangsa (termasuk di dalamnya kemerdekaan bangsa), maka orang Indonesia harus mau menimba

segala macam nilai budaya Barat (sains, teknologi, dan sebagainya) yang membuat budaya Barat itu unggul dan berhasil mengalahkan bangsa Indonesia.

Dilihat dari beberapa masalah yang diangkat oleh Mochtar Lubis melalui novelnya *SdJ*, terlihat adanya kritik-kritik sosial-politik pada masa demokrasi liberal parlementer. Bagi Mochtar Lubis, sebagai pengarang yang hidup pada jamannya, kondisi-kondisi sosial-politik yang dialami secara langsung, pastilah tidak lepas dari perhatiannya, mengingat pengarang adalah "anak zaman" bangsanya. Kondisi-kondisi yang pernah dilihat dan dialami itulah yang kemudian diangkat melalui tokoh-tokoh ceritanya.

Demikianlah analisis kondisi sosial yang terbayang dalam novel *SdJ* karya Mochtar Lubis.

BAB V
KESIMPULAN